

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia ( Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang di Ubah Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Amzah dalam Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Aulia Rahman, 2017, *Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga Peradilan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Aziz Syamsuddin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta
- B. Herry Priyono, 2018, *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Piana*. PT. Citra Aditya Bukti. Bandung
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Brigita P. Manohara, *Dagang Pengaruh (Trading In Influence di Indonesia)*, 2017, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Elwi Danil. 2012. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Cetakan Kedua. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Sunoto, 1989, *Mengenal Filsafat Pancasila Seri 4 : Filsafat Sosial dan politik Pancasila*, Edisi Ketiga, Penerbit ANDI Offset, Yogyakarta

- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, America,
- Jur. Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1971, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung
- Lorens Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Metode Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- \_\_\_\_\_ 2009. *Metode Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri MartonosoeWignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B. J.M. Ten Berge, P.J.J. Van Buuren, F. A. M. Stroink, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo, 1982. *Metodologi penelitian hukum, gramedia Indonesia*, Jakarta
- Sri Soematri, 1993, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugiyono, 2010, *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tom L. Beauchamp & James F. Childress, 1989, *Principles of Biomedical Ethic*, Oxford University Press, Washington, D.C,

Yenti Garnasih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Depok

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi , 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR RI

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

### C. Sumber Lain

Arli Fauzi dalam bukunya Bambang Purnomo, 2013, *Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Hukum, Surabaya

Bassiouni dalam Uning Pratrimaratri, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Reproduksi (Kloning)*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang

Boy Yendra Tamin, 2017, *Pertanggung Jawaban Hukum Pejabat Pemerintah Terhadap tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkup Tugas dan Kewenangan Administratif*, Doctoral thesis, Universitas Andalas.Padang

\_\_\_\_\_, 2018, *Discretion as to the Object of the Criminal Law of Corruption in Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

\_\_\_\_\_, 2018, *Why Does Need a Clarity Concept of Legal Liability of Government Officials in Corruption Eradication Efferts*, Law Science Andalas University, Padang Medwell Journals

*Budaya, politik, Ikhtisar Struktur Politik* <http://www.Indonesia-investments.com>

Dian Maharani. 2013. *Luthfi Hasan Divonis 16 Tahun Penjara*, <https://nasional.kompas.com/reaed>

Esterberg dikutip dalam sugiono (2012:233), *Metode penelitian* menurut Sugiono, 22 November 2018, [http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode penelitian hukum sugiono. 2013.html](http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode%20penelitian%20hukum%20sugiono.2013.html).

*Issues Paper on Corruption and Economic Growth*, <http://oecd.org>.

Jose G. Vargas-Hernandes, *The Multiple Faces Of Corruption: Typology, Forms and Levels*, <http://ameppa.org>,

Moch Harun Syah, 2013, Kronologis Suap mantan Presiden PKS, Luthfi Hasaan, <http://www.Liputan6.com/news/read>

Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa, *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggung Jawaban pidananya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Repository, 2016, *Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, <http://Unpas.ac.id/9011/2>

Ulrich von Alemann, “*Bureaucratic and Political Corruption Controls, Reassessing the German Record*”, Heidenheimer, Arnold J., Johnston, Michael, Le Bine, Victor T. (eds) *Political Corruption A Handbook*, (New Brunswick, 1989),